

**DINAMIKA BIROKRASI DAN PERLUNYA REFORMASI
BIROKRASI LINGKUNGAN**

I Wayan Wesna Astara.¹

Universitas Warmadewa, Email: wesna_antara@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesian bureaucracy are in flux. Bureaucracy also can not be separated from the process of political activity. In political activity, the government bureaucracy often use a dual role. On the one hand, the bureaucratic administration role, and on the other hand, can play the role of practical politics, if not set out clearly in law. Government bureaucracy has a role congenital defects, namely as 'official royal disease'. Congenital defect in question is the existence of an opinion that the leadership of the bureaucracy felt it would add prestige, prestigious ruling if she has a lot of staff numbers, although no analysis of whether the number of staff able to work or not. Bureaucratic reform is needed to improve the condition.

Reform of the bureaucracy is putting bureaucracy as a public servant with a laid back bureaucracy as an institution of public servants and entrepreneurial system. Bureaucratic positions should be filled by those professional and competence. In addition, the need for strengthening supervision of conspiracy between political institutions and the bureaucratic institutions. Bureaucracy as implementers of government activity to public administration practices with three components, namely the government / state, private, people, still require the presence of additional components, namely a moral component. This component is required to maintain the bureaucratic and political conspiracy. Moreover, the moral components necessary to implement a system of bureaucratic cultural behavior of Pancasila that the smooth running of the state administration, the breath, the style and behavior of Pancasila.

Keywords : *Bureaucracy reformation, Pancasila Bureaucracy , Public service.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prilaku birokrasi di Indonesia tidak lepas dari produk birokrasi kolonial Belanda sebagai bagian dari perjalanan birokrasi Indonesia. Prilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi antara individu dan organisasinya. Miftah Thoha menyebutkan bahwa individu sebagai pendukung organisasi yaitu kedalam tatanan birokrasi akan berpengaruh terhadap

¹Dr.Drs. I Wayan Wesna Astara,SH.,MH.,M.Hum, adalah Dosen pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Warmadewa.

organisasi, karena individu mempunyai kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, penghargaan dan pengalaman lainnya.²

Etziomi Amitai (1964) pernah berujar, bahwa Birokrasi dibutuhkan dalam kehidupan manusia.³ Hal ini tidak dapat dihindari, bahwa pekerjaan organisasi pemerintahan dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, begitu manusia itu lahir dia membutuhkan catatan ke organisasi pemerintah tentang akte kelahiran, masuk sekolah mendaftar ke organisasi pemerintahan di bidang pendidikan, mau nikah, bahkan perceraian, meninggal duniapun masih membutuhkan upaya kantor pemerintah. Jelas betapa hebat dan menyeluruhnya urusan organisasi pemerintah itu untuk mengintervensi kehidupan dan kematian seseorang.

Menurut Geral Caiden (1982) mengatakan bahwa pekerjaan organisasi pemerintah itu tidak bisa dihindari oleh manusia ini.⁴ Ciri khas birokrasi ini menunjukkan sifat monopoli yang menjadikan mau tidak mau orang harus puas dengan pelayanan birokrasi pemerintah. Tampaknya tidak peduli apakah pelayanan itu cepat atau lambat, memuaskan atau menjengkelkan, menghargai manusia atau tidak peduli kepada manusia yang dilayani. Menurut Max Weber, sistem birokrasi itu tidak mengenal perilaku personal, sangat formal, dan sesuai dengan orde-prosedural.⁵ Perilaku birokrasi Weberian ini selalu berorientasi etatisme legalistic, karenanya pendekatan birokrasi yang dianut banyak pemerintah itu order – prosedural yang didasarkan pada aturan atau peraturan menjadi sifat yang tidak bisa ditinggalkan.

Walaupun sudah ada aturan yang jelas namun masih terjadi kesenjangan antara birokrasi dalam konsep rasional, normatif dan birokrasi dalam tataran empiris. Kingsley Davis (1949), mengemukakan bahwa didalam suatu masyarakat manusia ini selalu terdapat dalam *double reality* (realitas ganda); di satu sisi ada system normatif yang mengikat manusia untuk

²Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Jakarta, Kencana, hal. 10.

³Etziomi, Amatai, 1964, *Modern Organization*, Englewood Cliff, Prentice Hall, New Jersey.

⁴Caiden, Geral, E, 1982, *Publik Administrate*, Edisi ke-2, California Pilisades Oublisher.

⁵ Weber, Max, 1947 (trans), *The Teory of Social and Economic Organization*, Ed. AH. Henderson and Talcot Parsons, Glencoe, H Press (firt Published in 1927)

melakukan apa yang harus dilakukan, dan di sisi lain tatanan factual (*factual order*) yang mengatur mengenai apa yang dilakukan oleh manusia.⁶

Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai *officialdom* atau **kerajaan pejabat**. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Didalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yg jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yurisdiksi. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggungjawab resmi (*official duties*) yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya.⁷

Dari paparan tersebut di atas birokrasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, namun sering terjadi ketidak harmonisan antara konsep yang diterapkan dengan lingkungan birokrasi itu hidup dalam melayani kepentingan masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah : 1. Bagaimana penyakit birokrasi yang muncul dalam perjalanan birokrasi Indonesia? 2. Bagaimana menata reformasi birokrasi yang ideal sesuai dengan lingkungan budaya Indonesia?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi diyakini dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik **Vincent de Gournay** pada tahun 1745. Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam artian peyoratif (dengan nada negatif atau mengecam), yaitu untuk menyebut bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat dan kekuasaannya yang terlalu besar yang berada di tangan pejabat. Pada awal abad 19 di Eropa, birokrasi sering menjadi sasaran dari cemooh dan kritikan karena dianggap malas dan tidak efisien, karena para pejabatnya dianggap sewenang-wenang dan dianggap terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan social dan menyalahgunakan kekuasaannya.⁸

⁶Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.64

⁷ Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.2.

⁸Eva Etzioni-Halevy, 2011, *Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik*, Metapena Institute Yogyakarta, h. 13.

Ada hal yang menarik tentang tingkah laku presiden Jackson di Amerika Serikat yang bertalian dengan pemenangannya dalam pemilu dan kaitannya dengan birokrasi. Sewaktu Jackson menang dalam pemilihan presiden seakan-akan dia menang perang. Maka semua rampasan menjadi miliknya. Oleh karena partainya menang, maka semua jabatan administrasi pemerintah diisi orang-orang dari partainya. Tingkah laku Jackson mendapat kritikan dari salah seorang anggota kongres yang menyindirnya dengan rampasan perang tadi. Akibat tingkah laku yang kelihatan serakah itu, sejak saat itu perbendaharaan administrasi negara menambah istilah baru lagi, yakni “**Jacksonism**”. Ini diikuti oleh birokrat, misalnya mengangkat pegawai dari sanak familinya, dari sesama golongan, atau sesama lulusan universitas.⁹

Tokoh literature birokrasi Victor Thomson, berucap “birokrasi tidak mengenal belas kasihan. Tidak pula mengenal cinta kasih. Dikatakan selanjutnya bahwa birokrasi itu bersifat “impersonal”. Semua hal yang bertalian dengan urusan pribadi tidak berlaku dalam birokrasi. Penyakit Birokrasi adanya keinginan birokrasi untuk selalu menambah jumlah organisasinya, tanpa melakukan evaluasi terhadap lembaga organisasi yang ada (*the existing units*), apakah masih efektif atau justru tidak efektif kerjanya. Jika tidak efektif bisa saja dibubarkan atau digabung pada yang baru atau kalau masih efektif jangan dibentuk organisasi baru yang tugas pokoknya mirip atau sama. Penyakit yang suka menambah-nambah atau membentuk organisasi baru. Teori organisasi menyebutkan *Proliferation*. Proliferasi tergolong penyakit birokrasi. Menurut konsepnya, penyakit ini tumbuh karena pimpinan lembaga birokrasi kejangkitan penyakit **Parkinson** yakni suatu penyakit bahwa para pimpinan birokrasi merasa akan tambah wibawa, berkuasa bergengsi jika dia mempunyai jumlah staf yang banyak tanpa dianalisis apakah jumlah stafnya bisa bekerja atau tidak¹⁰

2. 2. Menata Reformasi Birokrasi Ideal sesuai dengan Lingkungan Budaya Indonesia

⁹Miftah Thoha, 2014, op.cit., h. 100-101.

¹⁰ Ibid., h.91-92.

Birokrasi berusaha diletakkan kembali sebagai institusi pelayan publik, dan dijauhkan dari berbagai bentuk intervensi politik. Usaha ini sejalan dengan ide *Reinventing Government*, sebuah cita-cita yang ingin meletakkan pelayanan public sebagai orientasi utama dari birokrasi pemerintahan. Namun usaha ini tidak berjalan mulus, beberapa kendala adalah sebagai berikut: *pertama*, di beberapa tempat birokrasi kita masih kental diwarnai oleh kultur ambtenar, ningrat, atau masih sering menempatkan public sebagai obyek kekuasaan daripada subyek yang harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Sering dilanda sindrom bisnis jabatan, jabatan yang diperoleh bukan karena prestasi, tetapi karena kedekatan dengan rezim penguasa. *Kedua*, di beberapa tempat ditengerai terjadi politisasi birokrasi varian baru. Apabila pada jaman Orde Baru dahulu politisasi birokrasi dilakukan dengan menempatkan birokrasi sebagai pilar penting dalam menyangga kelestarian kekuasaan satu rezim saja (monoloyalitas), pada saat ini birokrasi kita diintervensi oleh kekuasaan politik yang bervariasi, bahwa dalam tubuh birokrasi kita tumbuh ‘multiloyalitas’, artinya loyalitas birokrasi kita bervariasi mengikuti afiliasi politik rezim penguasa (tidak satu rezim). Oleh karena itu semakin sulit diharapkan mengembangkan pelayanan public yang berkualitas. Apa yang harus dilakukan ke depan? Kedepan Jabatan dalam birokrasi harus diisi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi, dalam arti memiliki kemauan, ketahuan, dan kemampuan bekerja sesuai bidang, harus diisi dengan memperhatikan profesionalisme. Kedepan dibutuhkan penguatan pengawasan masyarakat supaya tidak terjadi persengkongkelan antara lembaga politik dan institusi birokrasi.

Dalam implementasi otonomi Daerah UU No. 32 tahun 2004 mempunyai implikasi serius bagi daerah. Setidaknya pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama untuk melakukan kebijakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Untuk itu, suatu sistem birokrasi daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi acuan kerja.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan birokrasi yang mempunyai jiwa *entrepreneur*. Hal ini karena desentralisasi, baik dalam konteks administrasi maupun dalam konteks politik tidak akan pernah bisa dilaksanakan secara efektif jika aparat pemerintah daerah gagal mengembangkan kapasitasnya secara memadai untuk mengelola proses pembangunan. Konsep birokrasi *entrepreneurial* merupakan kritik terhadap birokrasi Weberian yang sangat hirarkhis.

Meskipun pada awalnya, birokrasi merupakan system kerja institusional yang diharapkan dapat menjadi alat untuk melayani kepentingan masyarakat dengan efektif dan efisien dan hanya memboroskan anggaran pemerintah. Selanjutnya Peter Drucker, mereka mulai melontarkan gagasan mengenai pentingnya birokrasi yang mempunyai jiwa *entrepreneur*.

Dalam konteks ini, *reinventing*, dimaknai sebagai penciptaan birokrasi dengan mendasarkan pada system wirausaha, yakni menciptakan organisasi-organisasi dan system public yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, *reinventing* berarti menciptakan sektor public yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan “system yang memperbaharui kembali secara sendiri”. Dengan kata lain, *reinventing*, menjadikan pemerintah siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. Selain itu, *reinventing* tidak hanya memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang ini, tetapi juga dapat membangun organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki keefektifannya di masa mendatang pada waktu lingkungan organisasi mengalami perubahan.¹¹

2.3 Aras Reformasi.: Birokrasi Konstitusional.

Dalam birokrasi peraturan hukum menjadi syarat dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan negara kepada pejabat pemerintah. Menurut Logemann hukum tata negara itu adalah hukum organisasi negara atau hukum keorganisasian negara atau dengan kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunan negara). Hukum itu terdiri dari persoalan-persoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan, timbul dan lenyapnya jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau kumpulan jabatan, serta hukum keorganisasian. Kemudian hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara, yaitu suatu lingkungan dimana kaidah-kaidah hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu dan lingkungan waktu tertentu.¹²

¹¹Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, h. 371-373.

¹²Ni'Matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.8-9.

Hirarki Perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, yang diatur dalam pasal 7 sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah
 1. Perda Provinsi
 2. Perda Kabupaten/Kota
 3. Perdes/Peraturan yang setingkat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 mengatur hirarkhis peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹³

A. Institusi/ Organisasi.

Institusi yang dibangun adanya satu kesatuan system administrasi mulai dari pemerintah pusat samapai ke daerah. Keinginan untuk membangun organisasi baru asalkan telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga organisasi yang ada apakah masih efektif. Lembaga birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah masih tergolong besar. Hal ini dipertahankan sebagai arena bargaining untuk mendukung presiden terpilih, jika perlu harus ditambah lagi supaya virus Parkinson dan proliferasi tidak bisa sembuh.¹⁴

¹³Ibid. h.61-67.

¹⁴Mittah Thoha, op.cit., h. 92.

B. Capacity .

Penempatan pejabat birokrasi semestinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme, kemampuan untuk mengisi jabatan birokrasi. Tidak berdasarkan belas kasihan dari pejabat atasan karena hubungan family atau telah memenangkan dalam pemilu. Untuk melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahan dengan melakukan pembangunan nasional untuk mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi menjadi strategic poin yang harus dilakukan. Untuk mencapai itu dibutuhkan suatu lembaga organisasi pemerintahan yang kuat, stabil, berwibawa dan terkendali.¹⁵

Dalam komponen *Good Governance*, proses perkembangan yang dijaga dalam praktik administrasi public pada pemerintah birokrasi agar tidak terhenti sampai ke sketsa: ketiga komponen yaitu; Pemerintah atau Negara, sector swasta/ *business* dan rakyat. Selain sketsa tersebut di atas, komponen moral menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen itu yang saling berinteraksi menciptakan pemerintahan yang baik. Komponen moral menyinari ketiga komponen tersebut. Apabila dalam pemilihan pejabat pemerintah, maka pertimbangan moral sebagai catatan harus menjadi penentu harus ada di berkas (file) setiap pejabat dan pegawai pemerintah.¹⁶

C. Networking

Komunikasi dalam menjalankan tugas birokrasi sangat penting, termasuk untuk membuat jaringan kerjasama kepada masyarakat dalam pengawasan pejabat public. Biasanya pejabat akan berusaha untuk tidak melakukan apa yang mereka tidak mampu mereka kerjakan. Seorang menteri ketika memerintah kepada bawahan untuk mengerjakan hal yang mesti dikerjakan mereka biasanya mengatakan “baik pak” dan diam saja. Akan tetapi mereka tetap diam, karena kesibukan menteri. Kemungkinan besar permintaan itu akan dluupakan saja setelahnya.¹⁷

¹⁵ Ibid., h.96.

¹⁶Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Politik Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 72-74.

¹⁷Sang Menteri terlalu sibuk untuk memantau pelaksanaan dari semua perintah yang ia berikan kepada birokrasi untuk dijalankan. Sejumlah laporan para pelaku dan pengamat. Pernyataan serupa juga dilontarkan dalam kaitannya dengan administrasi di Inggris. Joe haines (1977) Eva Etzionani-Halevy, op. cit., h. 228.

Dalam Negara yang demokratis terdapat suatu kebijakan public sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus mengikuti melaksanakan kebijakan politik tersebut. Demikian halnya prinsip konsultasi rakyat yang merupakan syarat ketiga dari system pemerintahan yang demokratis. Sarana komunikasi yang populer dalam pemerintahan yang demokratis ialah dengan melakukan dialog. Pejabat pemerintah bukanlah hanya duduk di singgasana kursi jabatan tanpa mau memelihara dialog dengan rakyat.¹⁸

D. Kesejahteraan.

Inti pokok dalam berorganisasi dan bernegara tujuan untuk kesejahteraan, menciptakan kerja yang selanjutnya diatur dalam bentuk aturan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sesuai dengan kompetensinya, profesionalismenya. Dalam konteks aparatur pelayanan public dalam hal ini PNS yang memang memiliki fungsi pelayanan public. PNS mempunyai hubungan dinas dengan negara disertai tugas dalam jabatan negeri. Tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Birokrasi dalam rangka pelayanan public memiliki aspek yang “multi-dimensi”, tidak hanya dapat didekati satu aspek saja. Misalnya aspek hukum atau aspek politik saja. Tetapi juga melingkupi aspek ekonomi dan juga aspek social budaya secara integrative. Perspektif ekonomi, pelayanan public adalah semua bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan demikian barang dan jasa harus disediakan secara eksklusif oleh negara.²⁰

Dalam optic politik, dapat dikatakan bahwa pelayanan public merupakan refleksi dari pelaksanaan Negara dalam melayani warga negaranya berdasarkan kontrak social pembentukan Negara oleh elemen-elemen warga Negara. Peran Negara dalam pelayanan dalam pelayanan public tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa.²¹ Dari sisi social budaya, pelayanan public merupakan sarana

¹⁸ Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h. 104.

¹⁹ Sirajuddin Didik Sukriono Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, h.80.

²⁰ Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, *Naskah Akademik RUU Tentang Pelayanan Publik*, Jakarta Lemlit UI, h. 4.

²¹ Sirajuddin Didik Sukriono Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press, h. 11.

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, system kepercayaan dan bahkan unsur religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan local yang berlaku.²²

Birokrasi Pancasila merupakan cita ideology dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan organisasi Negara dan swasta di Indonesia. Sistem perilaku budaya birokrasi Pancasila yang kita gunakan untuk memperlancar jalannya administrasi Negara atau swasta, nafas, gaya dan perilaku Pancasila. Para birokrat dalam menjalankan tugasnya yang tidak bisa lepas dari tatanan birokrasi itu selalu meresapi, menghayati, dan melaksanakan sila-sila dalam Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Mulai dari upaya merumuskan kebijakan atau ketentuan hukum, misalnya Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden sampai pada upaya pelaksanaan, pengendalian, dan perbaikan selalu bernafaskan Pancasila. Petunjuk nyata wujud pengamalan kelima sila Pancasila sebagaimana yang telah ditetapkan MPR no. II/MPR/1978, diterapkan dalam birokrasi Negara atau swasta kita. Oleh karena birokrasi merupakan suatu system, maka pengamalan sila sila dari Pancasila ke dalam suatu system tersebut akan sangat tergantung pada pimpinan dan para pelaksana birokrasi.²³

III PENUTUP.

3.1 Simpulan

Birokrasi sebagai “mesin” negara dalam menjalankan roda “pemerintahan” akan dipengaruhi oleh kekuatan politik pada masanya, sehingga terjadi pasang surut. Pasang surut dipengaruhi oleh politik hukum Negara sesuai dengan produk perundang-undangan tentang pemerintah Daerah. Pada masa pemerintahan Orde Baru susunan pemerintahan dikuasai oleh Golkar sebagai partai pemenang pemilu yang tidak menyebut dirinya sebagai partai politik. Muncul monoloyalitas terhadap pemerintahan. Para pimpinan partai politik yang baru hasil gerakan reformasi, yang kini menjabat menteri nampaknya mau melestarikan atau mewarisi cara-cara Golkar waktu memerintah. Semua organisasi pemerintah dikaburkan antara jabatan karier dan non karier, antara jabatan birokrasi dan jabatan politik. Kalau sekarang mau

²²Tim Peneliti Lemlit UI, *loc.cit.*, h. 5.

²³Miftah Thoha, *op.cit.*, h.11.

mengubahnya, kondisi mental, sikap dan perilaku politik kita belum berubah, maka akan mengulang-ngulang warisan yang lama.

Perlu adanya restrukturisasi dan reposisi birokrasi ini dan adanya pertimbangan untuk pelayanan public sebagai sebuah orientasi dan “membasmi” virus virus birokrasi. Kajian tentang peran birokrasi pemerintahan memiliki cacat bawaan sebagai penyakit *officialdom* atau kerajaan pejabat. Adanya suatu pendapat bahwa Pimpinan birokrasi merasa akan tambah wibawa, berkuasa bergengsi jika dia mempunyai jumlah staf yang banyak tanpa dianalisis apakah jumlah stafnya bisa bekerja atau tidak.

Hal tersebut di atas memerlukan reformasi birokrasi yaitu birokrasi sebagai pelayan public, *reinventing Government* dengan meletakkan kembali sebagai institusi pelayan public dan dapat pula dengan berdasarkan system wirausaha. Jabatan birokrasi harus diisi oleh orang-orang professional dan kompetensi. Selain itu, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap persengkongkelan antara lembaga politik, institusi birokrasi dan swasta/investor.

Birokrasi sebagai pelaksana kegiatan pemerintah dengan praktik administrasi public dengan tiga komponen yakni pemerintah/Negara, swasta, rakyat, namun perlu ada komponen moral untuk menjaga persengkongkelan birokrasi dan politik. Selain itu, perlu pelaksanaan system perilaku budaya birokrasi Pancasila yang memperlancar jalannya administrasi Negara, nafas, gaya dan perilaku Pancasila.

Aras Reformasi Indonesia yang berdasarkan hukum, terus diperjuangkan dengan penuh tanggungjawab moral, ideology Pancasila dengan organisasi pemerintahan yang kuat, stabil, berwibawa dan terkendali. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terus melakukan dialog dengan rakyat sebagai pemilik kedahulatan. Kesejahteraan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3.2 Saran

- Birokrasi Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dengan pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki budaya colonial supaya dalam era kemerdekaan dan reformasi perlu pembenahan birokrasi sesuai dengan birokrasi Pancasila.
- Praktek administrasi public dalam birokrasi Indonesia perlu pemisahan yang jelas antara politik dan admistrasi public (birokrasi) sehingga tidak saling intervensi dalam

praktik, apalagi dalam Pemilihan Kepala Daerah sering birokrasi dijadikan alat pendulang/pendukung untuk mencari suara.

- Perlu kewenangan dan peran yang jelas serta sanksi hukum apabila terjadi birokrasi berselingkuh dengan politik, swasta/pengusaha dalam rangka memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan/atau korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta
- Caiden, Gerald, E, 1982, *Publik Administrate, Edisi ke-2*, California Pilisades Oublisher
- Etziomi, Amatai, 1964, *Modern Organization*, Englewood Cliff, Prentice Hall, New Jersey
- Eva Etzioni-Halevy, 2011, *Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik*, Metapena Institute Yogyakarta,
- Sirajuddin Didik Sukriono Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta,
- Ni'Matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, *Naskah Akademik RUU Tetang Pelayanan Publik*, Jakarta Lemlit UI
- Weber, Max, 1947 (trans), *The Teory of Social and Economic Organization*, Ed. AH.
- Henderson and Talcot Parsons, Glencoe, H Press (firt Published in 1927)